

## **URUSAN KEHUTANAN**

### **1. DINAS KEHUTANAN**

#### **1) Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan**

##### **a) Tujuan**

Untuk lebih memanfaatkan potensi sumberdaya hutan secara efisien, optimal, adil dan berkelanjutan dengan mewujudkan unit-unit pengelolaan hutan lestari dan memenuhi kaidah *Sustainable Forest Management* (SFM) serta didukung industri kehutanan yang kompetitif.

##### **b) Sasaran :**

Masyarakat sekitar kawasan hutan yang berada di 2081 desa yang memerlukan penguatan kelembagaan dalam upaya pemberdayaan potensi sumber daya hutan dan hasil hutan.

##### **c) Pagu dan Realisasi Program**

Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan sebesar Rp. 18.957.900.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 18.232.054.670,00 (96,17), Secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada lampiran (matrik 11 kolom)

##### **d) Hasil Pelaksanaan Pembangunan**

- Terselenggaranya kerjasama antar daerah dan peningkatan investasi kehutanan di 8 Provinsi, 10 Kali
- Pengembangan hutan rakyat masing-masing seluas 30 Ha di Kabupaten Sampang, Pamekasan dan Sumenep; penanaman lahan di bawah tegakan masing-masing seluas 30 Ha di Kabupaten Trenggalek dan Tulungagung; pemberian bantuan kepada masyarakat pemilik hutan rakyat berupa bibit tanaman kayu-kayuan 24.000 batang, bibit tanaman MPTS 24.000 batang, benih tanaman semusim dan pupuk organik 42.000 Kg, dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 16.800 HOK

- Terlaksananya pemasaran, pengawasan dan pengendalian peredaran hasil hutan serta pengawasan pungutan iuran kehutanan melalui:
  - Penguatan kelembagaan masyarakat desa hutan di 12 Kabupaten, 12 Kelompok Masyarakat
  - Pemahaman tentang kelola kawasan hutan di 12 Kabupaten
  - Pengembangan usaha ekonomi masyarakat sekitar hutan di 12 Kabupaten, 12 Kelompok Masyarakat
  - Terbentuknya kelembagaan ecolabelling/ Forest Management Unit (7 FMU)
  - Pemantauan pelaksanaan tebangan Jatah Tebangan Tahunan (JTT) dan Non JTT, di 23 KPH
  - Tersedianya data produksi hasil hutan kayu dan non kayu di 2 KPH dan 28 Kabupaten
  - Terlaksananya pemantauan industri hasil hutan di 25 Kabupaten
  - Penataan hasil hutan dan tertib peredaran hasil hutan melalui optimalisasi PSDH di 23 KPH di Jawa Timur dan 2 KPH di Jawa Tengah
  - Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka mendukung sertifikasi ecolabelling dengan 300 orang peserta di 6 Kabupaten.
- Perencanaan, pemantauan dan pemantapan status kawasan, perlindungan hutan dan penggunaan kawasan hutan melalui:
  - Pemantapan dan pemantauan kawasan hutan yang digunakan diluar sektor kehutanan di 105 unit Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PPKH) dan 140 unit Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH)
  - Perubahan fungsi kawasan hutan seluas 182,58 Ha
  - Sosialisasi pengurusan ijin penggunaan kawasan hutan untuk JLS dan pemohon sebanyak 9 pemohon.
  - Terlaksananya rekonstruksi tata batas Tahura R.Soerjo sepanjang 50 Km.

- Pemberian bantuan masyarakat dalam rangka perlindungan batas kawasan hutan sebanyak 5000 batang
- Perlindungan Hutan dan pengembangan jasa lingkungan serta pengendalian peredaran hasil hutan, pengembangan infrastruktur dan pengendalian melalui :
  - Pengendalian kebakaran hutan yang diikuti 60 orang seluas 1.911 Ha
  - Pengamanan hutan terpadu dan fungsional yang diikuti 50 orang; dengan hasil dari pencurian pohon sebanyak 20.360 batang
  - Pengendalian jumlah pohon yang roboh dari bencana alam/longsor 110.343 Batang.
  - Patroli pengendalian kebakaran hutan berbasis masyarakat disekitar hutan 17 orang, 8 regu, 6 kali;
  - Sewa lahan pembuatan demplot jahe; pemberian bantuan benih jahe 1500 kg, pupuk kandang 25 Ton, pupuk urea 400 kg, SP 36200 kg, KCL 200 Kg.
  - Pemberdayaan UPT Peredaran Hasil Hutan melalui:
  - Pengawasan dan pengendalian peredaran hasil hutan berupa data perkembangan penerimaan kayu bulat yang masuk dari luar Jawa ke Provinsi Jawa Timur sebesar 1.114.852,22 M3
  - Pelayanan pemungutan retribusi pemeriksaan pengukuran dan pengujian hasil hutan sebesar Rp. 1.914.964.444,-
  - Pelaksanaan penyelesaian atas tindak pidana kejahatan peredaran hasil hutan dan berkoordinasi dengan instansi terkait, 33 kasus
  - APP bidang Kehutanan dan Gerdu Taskin melalui pembinaan APP di 4 Kabupaten (Blitar, Madiun, Bojonegoro, Malang); dan bimbingan teknis kegiatan APP di Blitar, Malang, Madiun dan Bojonegoro. Bantuan partisipasi pembersih lapangan, pengolahan tanah, pemupukan, pemberian bantuan bibit kelengkeng 2000 batang, rambutan 4000

batang, durian 2000 batang, koloni lebah 110 stup, pupuk organik 2000 kg

- Pembinaan desa model konservasi melalui:
  - Pelatihan/ pembinaan kelompok konservasi alam (KKA) dan Kelompok Pecinta Alam (KPA) 90 orang
  - Penyuluhan masyarakat temu kader konservasi, 90 orang
  - Penyuluhan masyarakat desa model konservasi 15 Desa
  - Bantuan tanaman MPTS 10.500 batang dan toga 6 unit
  - Pembuatan instalasi biogas di 6 lokasi desa penyangga 6 unit)
- CPendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka mendukung pembinaan desa model konservasi melalui:
  - Pelatihan/Pembinaan KKA dan KPA diikuti 600 orang;
  - Penyuluhan masyarakat desa penyangga di 5 lokasi di desa penyangga; 250 orang
  - Temu karya tulis ilmiah 100 orang;
  - Lomba karya tulis ilmiah; diikuti 100 orang pelajar
  - Penyaluran bantuan bibit tanaman, media pupuk; bibit cemara 6000 batang; bibit toga 2 paket.
  - Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka mendukung rehabilitasi hutan dan lahan (pemanfaatan lahan di bawah tegakan, pengembangan usaha hutan rakyat) melalui kegiatan pendalaman wacana RHL (pengembangan usaha hutan rakyat, pemanfaatan lahan di bawah tegakan, 400 orang
- Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka mendukung pelatihan LMDH melalui:
  - Pembekalan teknis kegiatan pelatihan dan studi lapang aneka usaha kehutanan di Jawa tengah, 1016 orang.

- Bantuan ke Kabupaten Bangkalan dalam rangka memperingati hari gotong royong berupa pupuk organik 5000 Kg, benih tanaman semusim 500 Kg, bibit tanaman MPTS 1000 batang, Bantuan ke Kabupaten Situbondo berupa pupuk organik 5000 Kg, benih tanaman semusim 1000 Kg
- Bantuan ke Kabupaten Banyuwangi berupa alat pengelolaan limbah ternak 3 paket;
- Bantuan ke Kabupaten Pasuruan berupa alat pembuatan pupuk organik 3 unit.
- Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka mendukung pembinaan kelembagaan melalui:
  - Pembentukan Forest Management Unit (FMU) di 6 Kabupaten dengan peserta 300 orang (Blitar, Batu, Bojonegoro, Ngawi, Madiun dan Sumenep);
  - Penyusunan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) FMU di 6 Kabupaten dengan peserta 300 orang (Blitar, Batu, Bojonegoro, Ngawi, Madiun dan Sumenep);
  - Pendataan anggota FMU guna mengetahui pemetaan Tata Guna Lahan di 6 Kabupaten dengan peserta 300 orang (Blitar, Batu, Bojonegoro, Ngawi, Madiun dan Sumenep);
  - Teknik inventarisasi Potensi guna menghitung produksi lestari FMU di 6 Kabupaten dengan peserta 300 orang (Blitar, Batu, Bojonegoro, Ngawi, Madiun dan Sumenep);
  - Evaluasi penyiapan FMU.
- Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka mendukung sertifikasi ecolabelling hutan rakyat melalui:

- Pelatihan usaha ekonomi dalam upaya peningkatan usaha masyarakat sekitar hutan produksi di 5 Kabupaten 300 orang peserta (Malang, Jombang, Trenggalek, Pacitan dan Situbondo);
- Sosialisasi kelola kawasan dan pengamanan hutan dalam upaya peningkatan usaha Peningkatan produktifitas tanaman porang dalam upaya peningkatan masyarakat sekitar hutan produksi 10.000 Kg 5 Kabupaten;
- Sosialisasi Ecolabelling Hutan Rakyat melalui:
  - Sosialisasi ecolabelling hutan rakyat atau pengelolaan hutan berbasis masyarakat lestari (PHBML) 6 kabupaten, 240 orang peserta (Blitar, Batu, Bojonegoro, Ngawi, Madiun dan Sumenep)
  - Teknik pengukuran pohon berdiri diikuti 240 orang peserta dari 6 Kabupaten (Batu, Bojonegoro, Ngawi, Madiun, Sumenep); Penyusunan Standart Operating Procedure (SOP) guna penyiapan pengajuan dokumen FMU 240 orang 6 Kabupaten (Batu, Bojonegoro, Ngawi, Madiun, Sumenep).
  - Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka mendukung APP Bidang Kehutanan dan Gerdu Taskin melalui orientasi kegiatan pendidikan kemasyarakatan APP di 4 Kabupaten (Madiun, Bojonegoro, Malang, Blitar); pemberian bantuan bibit MPTS dalam rangka sapari mapan bener 12.000 Kg (Banyuwangi, Blitar, Bangkalan); pemberian bantuan bibit MPTS dalam upaya peningkatan usaha produksi 10.000 kg (Ponorogo, Madiun); pemberian bantuan Porang 6750 Kg, pupuk organik 3900 kg, alat perajang porang 50 unit di Kabupaten Madiun, Bojonegoro, Malang).
  - Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka mendukung peningkatan partisipasi masyarakat melalui pengelolaan Hutan

bersama Masyarakat (PHBM), peningkatan penyuluhan kehutanan dan aneka usaha kehutanan melalui Pembinaan penyuluh kehutanan swadaya (PKS) 11 orang; Pembekalan teknis kegiatan pelatihan dan studi lapang dalam rangka pengembangan aneka usaha kehutanan diikuti 30 orang peserta; Pelatihan dan studi lapang dalam rangka pengembangan aneka usaha kehutanan 15 orang di Jawa Tengah.

- Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka mendukung peningkatan usaha masyarakat sekitar hutan produksi melalui:
  - Pelatihan peningkatan kelembagaan dalam upaya peningkatan usaha masyarakat sekitar hutan produksi 5 Kabupaten 300 orang peserta (Malang, Jombang, Trenggalek, Pacitan dan Situbondo);
  - Sosialisasi kelola kawasan dan pengamanan hutan dalam upaya peningkatan usaha masyarakat sekitar hutan produksi 5 Kabupaten 300 oarang (Malang, Jombang, Trenggalek, Pacitan dan Situbondo);
  - Peningkatan produktifitas tanaman porang dalam upaya peningkatan masyarakat sekitar hutan produksi 10.000 Kg di 5 Kabupaten (Malang, Jombang, Trenggalek, Pacitan dan Situbondo);
  - Pemberian bantuan pupuk oragnik dalam upaya peningkatan usaha masyarakat sekiatar hutan produksi 5000 kg 5 Kabupaten (Malang, Jombang, Trenggalek, Pacitan dan Situbondo); Pemberian bantuan perajang porang 300 unit;
  - Evaluasi pelaksanaan peningkatan usaha masyarakat sekitar hutan produksi.

- Peningkatan partisipasi masyarakat melalui pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM), peningkatan penyuluhan kehutanan dan aneka usaha kehutanan melalui:
  - Bimbingan teknis 1 Kabupaten
  - Pemberian bantuan kepada masyarakat, pupuk organik 2000 Kg; benih tanaman semusim 2000 Kg; Benih porang 1500 Kg
  - Pemberian bantuan alat perajang pakan ternak sebanyak 5 unit; Pemberian bantuan alat granulator pupuk organik sebanyak 5 unit
  - Pembangunan dan pengembangan kebun bibit desa (KBD) melalui:
    - Survey lokasi Kebun Bibit Desa (KBD) 10 lokasi (Malang, Kota Batu, Trenggalek, Banyuwangi, Situbondo, Kediri, Bondowoso, Jember, Pacitan, Ponorogo);
    - Pemberian bantuan polybag 120.000 buah, 10 unit KBD, benih sengon 50 kg, benih jati 10 kg, benih mahoni 20 kg, benih jambon 10 kg, tanah top soil 50 M3; pupuk organik 50.000 Kg; 2.450 Kg; pengadaan obat-obatan 10 liter; sewa lahan 2,5 Ha; Pembersih lapang, pengisian kantong plastik, penanaman, pemeliharaan, pengawasan di 10 KBD.
- Pemberdayaan dan pengembangan UPT Perbenihan Tanaman Kehutanan melalui:
  - Pembinaan pengada benih di 25 lokasi (Pacitan, Ngawi, Magetan, Tulungagung, Ngajuk, Mojokerto, Jombang, Madiun, Ponorogo, Trenggalek, Tuban, Lamongan, Gresik, Bojonegoro, Situbondo, Bondowoso, Jember, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Probolinggo, Lumajang, Malang);



- Sosialisasi UPT Perbenihan di Madiun 45 orang, Bojonegoro 50 orang, Malang 60 orang, Pamekasan 25 orang, inventarisasi sumber benih 15 lokasi;
- Workshop perbenihan tanaman hutan 30 orang, pelatihan perbenihan tanaman kehutanan di sumedang 10 orang;
- Kajian ilmiah potensi bibit/ benih dalam percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat Jawa Timur dan Peraturan data tentang benih khusus bidang kehutanan.
- Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi kegiatan pembangunan kehutanan SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dan Pelaporan.

Pencapaian sasaran pembangunan kehutanan dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Komponen	Satuan	2010	2011
1.	Mengembangkan jaringan kerjasama bidang kehutanan dengan seluruh stakeholder dalam pembangunan kehutanan			
	Kerjasama Mitra Praja Utama (MPU) Bidang Kehutanan	kali	10	10
	Kesepakatan kerjasama di bidang Kehutanan diantara provinsi anggota MPU dan terjalinnya hubungan kerjasama yang harmonis antar anggota MPU bidang Kehutanan	Anggota	8	8
2.	- Optimalisasi pemanfaatan hutan dan lahan untuk			

	pengembangan hutan tanaman dan hutan rakyat			
	Pengembangan hutan rakyat dan pemanfaatan lahan di bawah tegakan:	Ha	120	120
	Penyerapan tenaga kerja	HOK	16.800	16.800
	Pendidikan kemasyarakatan Produktif dalam rangka mendukung rehabilitasi hutan dan lahan (pemanfaatan lahan di bawah tegakan, pengembangan usaha hutan rakyat)	orang	200	400
3.	Meningkatkan nilai tambah dan manfaat hasil hutan kayu, serta peningkatan partisipasi masyarakat luas dalam pengembangan hutan tanaman, guna memenuhi pasokan bahan baku kayu:			
	Penguatan kelembagaan masyarakat desa hutan	Kab Pokmas	11 11	12 12
	Pemahaman tentang kelola kawasan hutan	Kab	11	12
	Pengembangan usaha ekonomi masyarakat sekitar hutan (dikmas)	Kab Pokmas	11 11	12 12
	Terbentuknya kelembagaan ecolabelling / Forum Management Unit (FMU)	FMU	7	6
	Sosialisasi ecolabelling hutan rakyat	FMU Kab	7 7	6 6

	Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka mendukung sertifikasi ecolabelling	Orang	1400	300
	Terwujudnya hutan rakyat lestari	Kab	7	6
	Pemantauan pelaksanaan tebangan Jatah Tebangan Tahunan (JTT) dan Non JTT	KPH	23	23
	Penyusunan rencana penetapan tebangan JTT dan Non JTT	KPH	23	23
	Data produksi hasil hutan kayu dan non kayu	KPH Kab	23 28	23 28
	Pemantauan pengembangan industri hasil hutan	Kab	23	25
	Penataan hasil hutan dan tertib peredaran hasil hutan melalui optimalisasi pemantauan PSDH	KPH (Jatim) KPH (Jateng)	23 2	23 2
4.	Memantapkan status dan fungsi kawasan hutan			
	Pemantapan dan pemantauan kawasan hutan yang digunakan diluar sektor kehutanan	Unit PPKH Unit TMKH	98 120	105 140
	Perubahan fungsi kawasan hutan	Ha	-	182,58
	Sosialisasi pengurusan ijin penggunaan kawasan hutan untuk JLS dan Pemohon	Pemohon	9	9

	Rekonstruksi Tata Batas Tahura R.Soerjo	Km	15	50
	Bantuan masyarakat dalam rangka perlindungan batas kawasan hutan	Batang	5000	5000
5.	Meningkatkan perlindungan dan pengamanan hutan			
	Pencurian pohon	Btg	23.879	20.360
	Kebakaran hutan	Ha	225	1.911
	Bencana alam	Btg	54.585	110.343
	Bibrikan	Ha	5	-
6.	Meningkatkan pelayanan, pengawasan dan pengendalian peredaran hasil hutan			
	Pengawasan dan Pengendalian peredaran hasil hutan berupa data perkembangan Penerimaan Kayu Bulat yang masuk dari luar Jawa ke Provinsi Jawa Timur	M <sup>3</sup>	1.198.631,37 M <sup>3</sup>	1.114.852,22 M <sup>3</sup>
	Pelayanan pemungutan retribusi pemeriksaan pengukuran dan pengujian hasil hutan	Rp.	Rp. 6.625.432.683	Rp. 1.914.964.444
	Pelaksanaan penyelesaian atas tindak pidana kejahatan peredaran hasil hutan dan berkoordinasi dengan instansi terkait	Kasus	36 Kasus	33 Kasus
7.	Meningkatkan peran serta			

	masyarakat dalam pembangunan kehutanan yang berkelanjutan.			
	Pemberian bantuan stimulan bagi usaha produktif masyarakat desa hutan dan pendidikan kemasrakatan produktif dalam rangka mendukung APP bidang kehutanan dan Gerdu Taskin	kabupaten Pokmas desa hutan	8 18	9 22
	Penyerapan tenaga kerja petani desa hutan	HOK	270 HOK	330 HOK
	Sosialisasi Perda No. 12 Tahun 2007 tentang Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	kabupaten	5	-
	Pembinaan Desa Model Konservasi:			
	Pelatihan/ pembinaan Kelompok Konservasi Alam (KKA) dan Kelompok Pecinta Alam (KPA)	Orang	90	90
	Penyuluhan Masyarakat Temu Kader	Orang	90	90
	Penyuluhan Masyarakat Desa Model Konservasi	Desa	11	15
	Bantuan tanaman MPTS, Toga	Btg Unit	9500 4	10500 6
	Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka mendukung pembinaan desa model konservasi:			
	Pelatihan/ pembinaan KKA	orang	600	600

	dan KPA			
	Penyuluhan masyarakat desa penyangga	orang	250	250
	Temu karya generasi muda pecinta alam (GEMPALA)	orang	50	50
	Lomba Karya Tulis Ilmiah	Orang	22	100
	Pendidikan kemasyarakatan Produktif dalam rangka mendukung rehabilitasi hutan dan lahan (pemanfaatan lahan di bawah tegakan, pengembangan usaha hutan rakyat)	Orang	200	400
	Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka mendukung Pelatihan LMDH	Orang	876	1016
	Pendidikan kemasyarakatan Produktif dalam rangka mendukung pembinaan kelembagaan	Orang Kab	880 3	808 3
	Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka mendukung sertifikasi ecolabelling	Orang Kab	1400 7	300 6
	Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka mendukung peningkatan usaha masyarakat sekitar hutan produksi	Orang Kab	200 4	300 5
8.	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan kawasan			

	hutan melalui peningkatan pelaksanaan program PHBM yang partisipatif			
	Pemberian bantuan kepada masyarakat:	Ha	20	10
	Pupuk organik	Kg	2000	2000
	Benih Tanaman semusim	Kg	1230	2000
	Benih porang			
	Alat Perajang Porang	-	-	1500
	Alat perajang pakan ternak	-	250	-
	Alat Granulator pupuk organik	-	-	5
		-	-	5
	Bimbingan Teknis	2 Kab	4 Kab	1 Kab
	Meningkatkan Pemberdayaan UPT Perbenihan Tanaman Hutan dan meningkatkan Peningkatan kinerja kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana:			
	Peningkatan kinerja kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana	Orang	-	6
	Pembina pengada benih	Kab	-	25
	Sosialisasi UPT Perbenihan	Orang	-	180
		Wilayah		4
		Bakorwil		
9.	Pembangunan dan pengembangan kebun bibit	KBD	-	10
		Ha		25

	desa (KBD): Penyerapan tenaga kerja	HOK		6620
--	--	-----	--	------

Pembangunan kehutanan di Provinsi Jawa Timur selama periode 2010-2011 telah berhasil meningkatkan hubungan kerjasama dalam forum Mitra Praja Utama (MPU) yang ditunjukkan dengan hubungan kerjasama antara anggota Mitra Praja Utama Bidang Kehutanan yang didalamnya terdapat 10 Provinsi (Lampung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI.Yogyakarta, Jatim Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur) yang terus berkembang dimana pada tahun 2010 kerjasama yang disepakati melalui pemantapan penerapan pola pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam dan tahun 2011 telah tersusun fasilitasi persiapan regulasi mengenai kontribusi jasa lingkungan sumber daya hutan (SDH). Adanya Forum kerjasama MPU dapat membantu memecahkan permasalahan sektor kehutanan diantara anggota MPU.

Optimalisasi pemanfaatan hutan dan lahan untuk pengembangan hutan tanaman dan hutan rakyat dilakukan melalui pengembangan hutan rakyat dan pemanfaatan lahan di bawah tegakan selama periode 2010 - 2011 telah mencapai luasan 240 Ha. Kegiatan tersebut berhasil menyerap tenaga kerja bagi masyarakat sekitar hutan sebanyak 33.600 HOK. Pengembangan dan pemanfaatan lahan di bawah tegakan dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan dengan menanam tanaman semusim berupa padi gogo, jagung, empon-empon, porang. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan tidak hanya memanfaatkan lahan di bawah tegakan tetapi dapat membangun dan mengembangkan hutan rakyat di lahan milik sehingga hasil hutan kayu dapat memenuhi pasokan bahan baku kayu bagi industri primer (kayu), selain itu peran serta masyarakat dilibatkan melalui pendidikan



kemasyarakatan produktif dalam rangka mendukung rehabilitasi hutan dan lahan (pemanfaatan lahan di bawah tegakan, pengembangan usaha hutan rakyat. Pada Tahun 2010-2011 telah diikuti sertakan masyarakat sebanyak 600 orang. Keikutsertakan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan dalam rangka mendukung rehabilitasi hutan dan lahan (pemanfaatan lahan di bawah tegakan, pengembangan usaha hutan rakyat mengalami peningkatan. Pada Tahun 2010 diikuti 200 orang kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2011 menjadi 400 orang atau meningkat 100%.

Dalam upaya meningkatkan pasokan kebutuhan kayu bagi industri primer, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur melakukan beberapa kegiatan selama tahun 2010-2011 melalui terbentuknya kelembagaan ecolabelling (FMU). Tahun 2010 FMU yang terbentuk 7 FMU di Kabupaten Jember, Bondowoso, Trenggalek, Ponorogo, Jombang, Pamekasan, Malang, dan Tahun 2011 FMU yang terbentuk 6 FMU di Kabupaten Blitar, Bojonegoro, Ngawi, Madiun, Sumenep dan Kota Batu. Pencapaian terbentuknya FMU selama periode 2010-2011 adalah 13 FMU. Dengan terbentuknya FMU diharapkan kayu yang berasal dari hutan rakyat memiliki label/cap bertuliskan "*ecolabelling*" (lestari) sebagai salah satu syarat dalam memenuhi kebutuhan pasar kayu-kayuan Internasional. Dinas Kehutanan melalui kegiatan fasilitasi ecolabelling dan pendidikan masyarakat dalam rangka mendukung memfasilitasi sertifikasi ecolabelling 7 FMU dengan luas 10.700 Ha, selanjutnya tahun 2011 sertifikasi ecolabelling diberikan kepada 6 FMU dengan luasan 3.573 Ha, sehingga hutan rakyat yang sudah tersertifikasi dari tahun 2010-2011 seluas 14.273 Ha, selain itu untuk mendukung kegiatan sertifikasi ecolabelling mulai tahun 2010 dilaksanakan pendidikan kemasyarakatan produktif yang diikuti 1700 orang peserta dan pendidikan kemasyarakatan produktif disekitar hutan produksi yang mengalami

peningkatan dari tahun 2010 diikuti 200 orang peserta meningkat 50% menjadi 300 orang peserta pada tahun 2011.

Selain itu dalam rangka mewujudkan kelestarian hutan di Jawa Timur Dinas kehutanan telah melakukan penyusunan rencana Jatah Tebang Tahunan (JTT) dan Non JTT untuk hutan produksi yang telah diusulkan oleh Perum Perhutani Jawa Timur dari 23 KPH dan melakukan pemantauan pelaksanaan tebang JTT tahunan di 23 KPH. Dengan demikian kegiatan penebangan di hutan produksi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor: 6 Tahun 2005 tentang Penertiban dan Pengendalian Hutan Produksi di Provinsi Jawa Timur sehingga tercapai keseimbangan hutan sebagai fungsi ekologi, ekonomi dan sosial.

Kelestarian hutan tidak hanya dilihat dari tanaman atau pohon yang tumbuh di hutan tetapi juga memperhatikan kawasan yang ditunjuk atau ditetapkan sebagai kawasan hutan, agar kawasan hutan tetap sesuai dengan fungsinya perlu adanya penetapan dan pengukuhan kawasan hutan. Dinas kehutanan Provinsi Jawa Timur dalam rangka mewujudkan pelestarian kawasan hutan telah melakukan kegiatan pemantapan dan pemantauan kawasan hutan yang digunakan di luar sektor kehutanan pada tahun 2010 terdapat 98 kasus PPKH dan 120 TMKH selanjutnya pada tahun 2011 terdapat 105 PPKH dan 140 TMKH. Meningkatnya jumlah tukar menukar dan pinjam pakai kawasan hutan disebabkan adanya kebutuhan perluasan lahan yang digunakan untuk kepentingan peningkatan sarana dan prasarana oleh pemerintah setempat, salah satunya adalah melalui pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) yang melewati kawasan hutan produksi di 8 Kabupaten (Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi). Pada tahun 2010-2011 terdapat 9 pemohon ijin penggunaan kawasan hutan untuk JLS seluas 182,58 Ha dan persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan di 8 Kabupaten tersebut sudah diperpanjang.

Selain itu untuk mendukung agar status kawasan hutan memiliki status yang jelas yang dikelola oleh Dinas Kehutanan (Tahura R.Soerjo) selama tahun 2010-2011 telah dilakukan pengukuran dan pemasangan batas serta pembuatan proyeksi batas ulang dengan maksud mengembalikan posisi pada peta tata batasnya melalui rekonstruksi tata batas Tahura R.Soerjo, tahun 2010 sepanjang 15 km selanjutnya tahun 2011 dilakukan tata batas sepanjang 50 Km. Dari tahun 2010-2011 terdapat peningkatan 233,33%. Untuk menjaga pergeseran tata batas maka Dinas Kehutanan memberikan bantuan tanaman secang dan salak selama periode 2010-2011 sebanyak 10.000 batang, bantuan tersebut juga dimaksudkan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pengamanan hutan.

Pencapaian peningkatan perlindungan dan pengamanan hutan ditunjukkan melalui: (1) menurunnya tingkat pencurian pohon demikian juga untuk tahun 2010-2011, turun sebanyak 3.519 batang (14,73 %); (2). Meningkatnya luas kebakaran hutan pada tahun 2010 seluas 225 Ha dan tahun 2011 seluas 1.911 Ha hal ini disebabkan musim penghujan yang lebih pendek, serta kurangnya partisipasi masyarakat sekitar kawasan hutan Tahura R.Soerjo dalam kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan hal tersebut juga ditandai meningkatnya jumlah pohon yang rusak akibat bencana alam akibat bencana alam (angin, tanah longsor), untuk tahun 2010-2011 jumlah pohon yang rusak dari 164.928 batang; (3) Bibrikan juga mengalami pasang surut terhadap luasan yang dibibrik, untuk tahun 2010-2011 mengalami penurunan 100% atau nihil sepanjang tahun 2011.

Selanjutnya pengamanan dan perlindungan juga dilakukan melalui peningkatan pengawasan pengendalian peredaran hasil hutan, selama periode 2010-2011 pengawasan dan pengendalian peredaran hasil hutan berdasarkan penerimaan kayu bulat yang masuk dari luar Jawa ke Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan jumlah kayu sebesar

83.779,15 M<sup>3</sup> atau 6,98%, hal ini disebabkan adanya kebijakan pengiriman kayu dari luar Provinsi Jawa Timur yang dibatasi karena adanya pengurangan jatah tebang tahunan yang ditetapkan Kementerian Kehutanan. Dari pengawasan dan pengendalian peredaran hasil hutan tersebut Provinsi Jawa Timur memperoleh Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi daerah Pemeriksaan Pengukuran dan Pengujian Kayu Bulat yang dilakukan oleh Petugas UPT Peredaran Hasil Hutan dari tahun 2010 ke 2011 s/d bulan Mei mengalami penurunan sebesar Rp. 4.710.468.239 (71,09 %) hal ini disebabkan karena adanya penghentian pemungutan Retribusi Daerah Yang Tidak Diatur dalam UU Nomor: 28 Tahun 2009 tentang : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Surat Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/888/013/2011 tanggal 28 April 2011, maka terhitung sejak tanggal 6 Mei 2011 pemungutan retribusi Pemeriksaan pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan untuk sementara dihentikan sambil menunggu ditetapkannya rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Retribusi daerah. Selama kurun waktu 2010-2011 dalam melaksanakan pemeriksaan, pengukuran dan pengujian hasil hutan terdapat penurunan kasus tindak pidana kejahatan peredaran hasil hutan 3 kasus atau 8,3% dari 36 kasus menjadi 33 Kasus dengan penyelesaian 100%.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan kehutanan yang berkelanjutan periode 2010-2011 ditunjukkan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat desa hutan yang diarahkan pada upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat dengan sasaran kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki usaha produktif dengan pola kemitraan yang berbasis cluster yang ditunjukan dengan jumlah kelompok masyarakat desa hutan yang mendapatkan bantuan stimulan pada tahun 2010 pemberian bantuan diberikan kepada 19 Pokmas yang terdapat di 9 Kabupaten (Ponorogo, Madiun, Blitar,

Probolinggo, Magetan, Lamongan, Nganjuk, Pacitan, Trenggalek), selanjutnya bantuan stimulan diberikan kepada 22 Pokmas desa hutan pada 9 Kabupaten (Ponorogo, Madiun, Blitar, Probolinggo, Magetan, Lamongan, Nganjuk, Pacitan, Trenggalek). Peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan APP dan Gerdu Taskin selama tahun 2010-2011 juga berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja petani desa hutan. Selama tahun 2010 sampai dengan 2011 penyerapan tenaga kerja pada kelompok masyarakat sekitar hutan mengalami peningkatan dari 270 HOK meningkat menjadi 330 HOK atau sebesar 22,22 %, selain itu untuk mendukung keberhasilan kegiatan APP bidang kehutanan dilaksanakan kegiatan pendidikan kemasyarakatan untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan anggota.

Selanjutnya untuk mendukung pencapaian percepatan rehabilitasi hutan dan lahan (pemanfaatan lahan dibawah tegakan, pengembangan usaha hutan rakyat) Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan pendidikan masyarakat dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kehutanan yang berkelanjutan selama periode tahun 2010-2011 mengalami peningkatan jumlah peserta pendidikan sebanyak 200 orang dari 200 orang menjadi 400 orang (100%). Selain itu dalam rangka meningkatkan pengetahuan kelompok masyarakat tentang pembangunan kehutanan yang berkelanjutan melalui APP bidang kehutanan telah melaksanakan pendidikan dan pelatihan kepada Pokmas selama periode tahun 2010-2011 meningkat 22,22% (4 Pokmas) dari 18 Pokmas menjadi 22 Pokmas.

Pencapaian penting lainnya adalah meningkatnya Pembinaan desa model konservasi melalui: (1) pelatihan/ pembinaan Kelompok Konservasi Alam (KKA), Kelompok Pecinta Alam (KPA) dari tahun 2010-2011 jumlah peserta pelatihan/pembinaan sebanyak 180 orang; (2) pemberian bantuan kepada masyarakat desa penyangga periode 2010-

2011 berupa tanaman MPTS dan tanaman toga meningkat dari 9500 batang MPTS menjadi 10.500 batang MPTS atau bertambah 1000 batang (10,52%) , sedangkan tanaman toga meningkat dari 4 unit menjadi 6 unit atau bertambah 2 unit (50%); (3) Dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan desa model konservasi dilakukan penyuluhan di desa penyangga kawasan konservasi selama tahun 2010-2011 meningkat dari 11 desa menjadi 15 desa atau sebesar 36,36% (4 desa), selain itu untuk mendukung keberhasilan pembinaan desa model konservasi Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur kurun waktu 2010-2011 melaksanakan pendidikan kemasyarakatan produktif dengan mengikut sertakan masyarakat sekitar desa penyangga, pecinta alam, siswa sekolah. Pencapaian tersebut dapat dilihat pada tahun 2010-2011 telah dilatih dan dibina 1200 masyarakat disekitar desa penyangga dalam kegiatan penyuluhan. Siswa sekolah juga dilibatkan secara aktif melalui kegiatan lomba karya tulis ilmiah sebagai bentuk pemahaman siswa dalam pengelolaan hutan, dimana pada tahun 2010 diikuti 22 orang siswa meningkat menjadi 100 orang atau bertambah 78 siswa, hal tersebut menunjukan keberhasilan 354 %.

Peran serta masyarakat dalam pembangunan kehutanan yang berkelanjutan juga diikuti dengan penguatan kelembagaan masyarakat di sekitar hutan. Melalui peningkatan peran aktif masyarakat inilah, diharapkan masyarakat memiliki inisiatif dan kreasi positif untuk memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lahan yang tersedia cukup melimpah. Pada Tahun 2010 diikuti 876 orang meningkat menjadi 1016 orang pada tahun 2011 atau 18,76%, dan diharapkan melalui kegiatan tersebut lebih diarahkan kepada kemandirian masyarakat untuk menjadi lebih produktif dalam mengembangkan dan memperkuat potensi yang dimiliki kelompok masyarakat sekitar hutan. Pencapaian tersebut juga ditunjukkan melalui keberhasilan pendidikan kemasyarakatan produktif

dalam rangka mendukung pembinaan kelembagaan tahun 2010-2011 diikuti 1688 orang.

Sedangkan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui peningkatan pelaksanaan program PHBM yang partisipatif telah diberikan bantuan kepada masyarakat berupa pupuk organik, benih tanaman semusim, benih porang, peralatan pendukung (perajang porang, perajang pakan ternak dan granulator pupuk organik). Pada Tahun 2010-2011 bantuan yang diberikan berupa pupuk organik 17.000 Kg, Benih tanaman semusim 3230 Kg, Porang 1500 Kg beserta bantuan alat perajang porang sebanyak 250 unit, alat perajang pakan ternak 5 unit yang diberikan pada tahun 2010 sedangkan alat granulator pupuk organik diberikan pada tahun 2011 sebanyak 5 unit. Selain itu guna memenuhi penyediaan bibit berkualitas Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur telah membuat 10 Unit Kebun Bibit Desa (KBD) (Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Kediri, Batu, Malang, Bondowoso, Jember, Situbondo, Banyuwangi) melalui pembuatan bibit tanaman hutan dan jenis tanaman MPTS.

Bibit hasil KBD ini nantinya akan digunakan untuk merehabilitasi dan menanam lahan kritis, lahan kosong dan lahan tidak produktif di wilayah Desa sekitar hutan. Disamping itu KBD juga dipakai sebagai wahana pemberian pengetahuan dan keterampilan mengenai pembuatan persemaian, penanaman dengan menggunakan benih/bibit yang berkualitas, serta peningkatan pendapatan masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja sebanyak 6620 HOK. Selain itu Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur memberikan dukungan pelayanan kepada produsen benih/bibit tanaman hutan melalui pemberian rekomendasi terhadap keadaan benih/bibit melalui Pembina pengada benih di 25 Kabupaten. Keberhasilan UPT Perbenihan Tanaman Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 ditunjukkan dengan adanya tenaga

professional/fungsional yang kompeten dalam kegiatan Pengujian Sumber Benih, Mutu Benih dan Mutu Bibit Tanaman Hutan, berupa pengembangan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang telah lulus ujian Standar Kerja Kompetensi Nasional Indonesia (SKKNI) sebanyak 6 orang sehingga kompeten untuk melakukan pengujian perbenihan/pembibitan tanaman hutan.

#### **e) Permasalahan dan Upaya Pemecahannya**

##### **Permasalahan**

- Keterbatasan SDM yang ada dalam kegiatan APP, sehingga sangat mempengaruhi dalam mengidentifikasi dan atau pemilihan kelompok masyarakat yang benar-benar produktif dan perlu dukungan pendanaan. Walaupun hal tersebut dapat dilakukan, maka Tim Koordinasi Kabupaten dan Tim Pembina dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur harus bekerja lebih keras untuk menyeleksi dan menetapkan kelompok masyarakat yang akan dijadikan sasaran pelaksanaan kegiatan APP bidang kehutanan.
- Dukungan finansial dari Dinas Kabupaten/Kota yang Membidangi Kehutanan untuk kegiatan pembangunan dan pengembangan hutan rakyat dan pemanfaatan lahan di bawah tegakan hutan rakyat di masing-masing wilayah tersebut masih terbatas.
- Kesenjangan bahan baku merupakan masalah besar yang akan sangat berpengaruh terhadap kelestarian sumber. Kapasitas terpasang industri jauh melebihi kemampuan hutan untuk menyediakan bahan bakunya secara lestari (over capacity). Kekurangan bahan baku untuk industri pengolahan kayu telah mendorong banyaknya penebangan melebihi ketentuan (overcutting) maupun penebangan ilegal.
- Pemberlakuan Sistem Informasi Penatausahaan secara Online (Si-PUHH ONLINE) yang sudah diterapkan oleh Kementerian Kehutanan RI, UPT.



- Keterbatasan kualitas sumber daya manusia (masyarakat pengelola hutan rakyat) dalam tahapan penyusunan dokumen sertifikasi ecolabeling hutan rakyat.
- Beberapa Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) tidak menyusun laporan LMKB, LMKO dan RPBBi secara berkala dan adanya ketidaksesuaian antara fisik kayu bulat dengan dokumen baik kayu bulat yang berasal dari hutan rakyat maupun hutan negara.
- Sulitnya mencari lahan kompensasi yang menempel pada kawasan hutan pada Kabupaten yang menggunakan kawasan hutan untuk pembangunan Jalan Lintas Selatan (Pacitan,Trenggalek,Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember dan Banyuwangi seluas 637,96 Ha
- Inventarisasi permasalahan Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PPKH) dan Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) di Jawa Timur masih ditemukan kendala untuk mencari lahan kompensasi yang menempel dengan kawasan hutan, demikian pula dalam kelengkapan dokumen pendukung yang belum memenuhi syarat serta partisipasi pemohon masih sangat kurang.
- Terdapat sengketa batas kawasan Tahura dengan masyarakat dan adanya perambahan pada kawasan Tahura R.Soerjo
- Kelembagaan perbenihan dan pembibitan tanaman hutan di Jawa Timur masih membutuhkan peningkatan kegiatan pengadaan sarana dan Prasarana, penerapan teknologi tepat guna serta jumlah tenaga ahli dan berkompeten.
- Masih rendahnya peran serta dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dalam pelaksanaan program PHBM. Keberadaan dan kelestarian sumber daya hutan sangat dipengaruhi oleh tingkat sosial dan ekonomi masyarakat sekitar hutan, yang selama ini sangat bergantung pada sumber daya hutan sebagai salah satu sumber pendapatan. Sharing peran serta masyarakat dalam pengamanan dan perlindungan hutan

sangat besar pengaruhnya terhadap keberadaan sumber daya hutan itu sendiri. Di sisi lain masalah yang dihadapi oleh masyarakat sekitar kawasan hutan adalah rendahnya tingkat pendapatan mereka.

- Sosialisasi Program PHBM kepada pejabat dinas terkait di tingkat Kabupaten/Kota dan Propinsi mutlak dilaksanakan secara berkesinambungan melalui pemaparan program secara transparan yang dilandasi dengan unsur keikhlasan berbagi dari segenap jajaran Perhutani akan mampu menumbuhkan partisipasi dari segenap stakeholders dalam pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.

### **Upaya Pemecahannya**

- Bimbingan teknis melalui pendampingan kelompok, diharapkan kegiatan APP bidang kehutanan dapat lebih baik, produktif dan pada akhirnya dapat memberi nilai tambah bagi masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani maupun LMDH di sekitar kawasan hutan produksi. Selain itu tidak kalah pentingnya adalah peran Dinas/ Kantor yang menangani urusan kehutanan di Kabupaten/ Kota, dan para pihak terkait, sebagai motivator dan dinamisator dalam peningkatan peran masyarakat.
- Perlunya ditingkatkan kerjasama antara Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dan Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan dalam rangka memonitoring dan mengevaluasi kemajuan kegiatan pengembangan usaha hutan rakyat dan pemanfaatan lahan di bawah tegakan di kabupaten/kota sehingga dapat dilihat tingkat keberhasilan dan permasalahan yang mungkin muncul.
- Menerapkan kebijakan dengan membangun suatu wood center sebagai pusat usaha dan jual beli kayu. Pembangunan terminal kayu bertujuan untuk Peningkatan pengamanan peredaran kayu hasil hutan di Jawa Timur, kepastian suply/ ketersediaan pasokan bahan baku kayu, Peningkatan tertib usaha hasil hutan.

- Peredaran Hasil Hutan harus segera menyiapkan sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia sebagai operator dalam sistem tersebut melalui pelatihan teknis Si-PUHH Online.
- Perlunya ditingkatkan kerjasama antara Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dan Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan dalam rangka memonitoring dan mengevaluasi kemajuan kegiatan sertifikasi ecolabeling hutan rakyat di kabupaten/kota sehingga dapat dilihat tingkat keberhasilan dan permasalahan yang mungkin muncul secara berkala.
- Memberikan teguran/peringatan atau sanksi bagi pelaku industri yang tidak memenuhi kewajibannya dalam penyusunan dan pelaporan kegiatan serta meningkatkan pengawasan atas dokumen penatausahaan hasil hutan dan peredaran kayu.
- Melaksanakan sosialisasi pengurusan ijin penggunaan kawasan hutan untuk JLS sehingga diperoleh masukan/pemahaman bagi PemKab dalam memperoleh ijin pinjam pakai.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan kawasan hutan dengan menghimpun dokumen yang tersaji dan merumuskan masalah serta solusi pemecahan masalahnya sehingga dihasilkan data kawasan hutan yang diperoleh dengan proses pinjam pakai dan tukar menukar.
- Dilakukan sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat di sekitar hutan tentang batas kawasan Tahura, untuk mengendalikan perambahan dilakukan patrol secara rutin oleh petugas terhadap batas kawasan Tahura R.Soerjo serta pemasangan kembali pal batas yang hilang sesuai dengan koordinat.
- Melakukan Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian Pengada dan/atau Pengedar Benih/Bibit Tanaman hutan serta pembangunan Sumber Benih.

- Mengusulkan alokasi anggaran yang ditujukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pada UPT Perbenihan Tanaman Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur selain itu menyiapkan tenaga professional/fungsional yang kompeten dalam kegiatan Pengujian Sumber Benih, Mutu Benih dan Mutu Bibit Tanaman Hutan, berupa pengembangan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang telah lulus ujian Standar Kerja Kompetensi Nasional Indonesia (SKKNI) sebanyak 6 orang sehingga kompeten untuk melakukan pengujian perbenihan/pembibitan tanaman hutan.
- Pembangunan masyarakat di sekitar kawasan hutan harus lebih ditingkatkan lagi, sehingga dengan hubungan kemitraan, dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar hutan untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui percepatan Pembangunan Masyarakat Desa Sekitar Hutan/ Daerah Tertinggal dalam rangka pengentasan kemiskinan.
- Penghargaan yang diterima baik Nasional maupun Provinsi.
- Tahun 2011 Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur memperoleh penghargaan Juara I Penanaman Satu Milyar Pohon 2010 Tingkat Nasional antar Provinsi, yang diserahkan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia (HPMI) yang jatuh pada tanggal 28 November dan Bulan Menanam Nasional (BMN) tahun 2011 di Bukit Merah Putih Citeureup Bogor, Jawa Barat.
- Memperoleh ISO 9001.2 Tahun 2008 tentang Manajemen Mutu melalui unit reaksi cepat
- Porang Muri dengan kategori ukuran diameter terbesar yaitu 45 cm dengan berat 21 Kg, yang dibudidayakan di Kabupaten Nganjuk.

## 2) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

### a) Tujuan

Untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dalam rangka peningkatan ruang terbuka hijau di Jawa Timur.

### b) Sasaran

Lahan kritis yang ada di Jawa Timur.

### c) Pagu dan Realisasi Program

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan sebesar Rp. 250.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 207.132.250,- (82,85 %), Secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada lampiran (matrik 11 kolom)

### d) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, 4 Kali (Triwulan I,II, III dan IV)

No	Komponen	Satuan	2010	2011
1.	Monitoring dan Evaluasi	Kali	-	4

### e) Permasalahan dan Upaya Pemecahannya

#### Permasalahan

Kurangnya koordinasi dalam penanganan rehabilitasi hutan dan lahan serta kurangnya kesinambungan pelaporan hasil pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan.

#### Upaya Pemecahan:

Meningkatkan koordinasi dan sinergisasi program dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di Jawa Timur.

### **3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan**

#### **a) Tujuan:**

Untuk merehabilitasi alam yang telah rusak dan mempercepat pemulihan sumberdaya alam, sehingga selain berfungsi sebagai penyangga system kehidupan juga memiliki potensi untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan demi terciptanya kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan kehutanan di Provinsi Jawa Timur dalam rangka peningkatan pendapatan serta menjaga kelestarian hutan.

#### **b) Sasaran**

Kawasan Tahura R.Soerjo seluas 27.868,30 Ha dan 43 Desa di kawasan penyangga beserta sarana prasarana obyek wisata alam kawasan Tahura R.Soerjo.

#### **c) Pagu dan Realisasi Program**

Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan sebesar Rp. 6.011.375.000,00 dengan realisasi Rp. 5.790.340.765,00 (96,32), Secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada LAMPIRAN (matrik 11 kolom).

#### **d) Hasil Pelaksanaan Pembangunan**

- Tercapainya rehabilitasi dan penataan kawasan Tahura R. Soerjo dengan kegiatan:
- Pembuatan tanaman reboisasi 1000 Ha pada tahun 2011
- Pemeliharaan Obyek Wisata Alam air terjun watu ondo, 1 unit.
- Pemeliharaan dan tanaman reboisasi Tahun 2009, 2010 dan tahun 2011
- Terlaksananya Pembuatan persemaian tanaman untuk kegiatan reboisasi
- Pendidikan kemasyarakatan dalam rangka mendukung pelestarian dan penataan kawasan Tahura R.Soerjo melalui :
- Penyuluhan kepada masyarakat dan generasi muda sekitar hutan yang berada di 43 desa penyangga

- Pembinaan petugas pengamanan hutan dan petugas tempat wisata
- Pemeliharaan dan peningkatan sarana prasarana obyek wisata alam melalui:
- Pemeliharaan obyek wisata alam air watu ondo, 1 paket
- Pembuatan pagar guest house, 1 paket
- Perbaikan atap aula, 1 paket
- Peningkatan PAD melalui jumlah pengunjung yang datang ke Obyek Wisata Alam Tahura R.Soerjo melalui retribusi karcis masuk
- Operasi pengamanan dan perlindungan hutan (reboisasi di Tahura R.Soerjo) seluas 800 Ha dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 14.872 HOK
- Reboisasi lahan kritis dan potensial kritis 30 Ha, dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 5400 HOK
- Terlaksananya penanaman pohon di kanan kiri jalan jalan nasional dan provinsi di Kabupaten Bojonegoro sepanjang 40 km

No	Komponen	Satuan	2010	2011
1.	Pembuatan tanaman reboisasi	Ha	1000	500
	Pemeliharaan dan tanaman reboisasi Tahun 2009, 2010 dan tahun 2011	Ha	500 Ha (th 2009, 2010)	300 Ha (th 2010, 2011)
	Pembuatan persemaian tanaman untuk kegiatan reboisasi	Batang	132.000	232.000
	Bantuan Stup lebah	Stup	50	75
2.	Pendidikan kemasyarakatan dalam rangka mendukung pelestarian dan penataan kawasan Tahura R.Soerjo:			
	Penyuluhan kepada masyarakat dan generasi muda sekitar hutan yang berada di 43 desa penyangga	Orang	1505	3180
	Pembinaan petugas	Orang	300	130

	pengamanan hutan dan petugas tempat wisata			
	Pemeliharaan dan peningkatan sarana prasarana obyek wisata alam:			
	Pemeliharaan obyek wisata alam air watu ondo Pembuatan pagar guest house Perbaikan atap aula	Paket	1	1 1
	Peningkatan PAD melalui jumlah pengunjung yang datang ke Obyek Wisata Alam Tahura R.Soerjo melalui retribusi karcis masuk	Rp.	761.478.750	874.435.000
3.	Percepatan rehabilitasi hutan di dalam dan di luar kawasan hutan:			
	Operasi pengamanan dan perlindungan hutan (reboisasi di Tahura R.Soerjo)	Ha		800
	Penyerapan tenaga kerja	HOK	-	14.872
	Reboisasi lahan kritis dan potensial kritis:	Ha	-	30
	Penyerapan tenaga kerja	HOK		5400

Dalam mengembangkan pengelolaan Tahura R.Soerjo selama tahun 2009-2011 Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur melakukan reboisasi kawasan hutan seluas 2.500 Ha serta pembuatan persemaian tanaman untuk kegiatan reboisasi sebanyak 964.000 batang. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dengan menurunnya luasan lahan kritis dalam kawasan Tahura R. Soerjo selama periode 2009-2010 seluas 300 Ha dari semula tahun 2009 seluas 2393 Ha menjadi 2093 Ha pada tahun 2010 (statistik Dinas kehutanan Prov.Jatim, tahun 2006-2010) Hal tersebut tidak terlepas dari terjadinya kebakaran hutan di Tahura R.Soerjo pada tahun 2009-2010 yang mencapai 1700 Ha sehingga dengan luasan



reboisasi seluas 2000 Ha Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur masih dapat mereboisasi kawasan di luar areal yang terbakar seluas 300 Ha.

Selain itu untuk mendukung pelestarian dan penataan kawasan Tahura R.soerjo Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur melalui UPT Tahura R.Soerjo telah melaksanakan pendidikan kemasyarakatan produktif dan peningkatan pemberdayaan peran serta masyarakat dalam mengelola dan melestarikan kawasan hutan disekitar 43 desa penyangga, serta peningkatan pengamanan dan perlindungan hutan di sekitar kawasan Tahura R.Soerjo. Kegiatan tersebut dilakukan melalui penyuluhan kepada masyarakat dan generasi muda sekitar hutan yang berada di sekitar 43 Desa penyangga yang mengalami peningkatan 1.675 orang dari 1505 orang pada tahun 2010 menjadi 3180 orang pada tahun 2011 atau meningkat 111,3%. Selanjutnya kegiatan pembinaan juga dilakukan kepada petugas pengamanan hutan dan petugas tempat wisata, dimana selama tahun 2010-2011 telah diikuti 430 orang petugas.

Pencapaian percepatan rehabilitasi hutan di dalam dan diluar kawasan Tahura R.Soerjo telah dilakukan berbagai upaya antara lain melalui operasi pengamanan dan perlindungan hutan seluas 800 Ha pada tahun 2011, kegiatan pengamanan yang dilaksanakan di kawasan Tahura juga berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 14.872 HOK, selanjutnya penyerapan tenaga kerja melalui reboisasi lahan kritis dan potensial kritis menyerap tenaga kerja sebanyak 5400 HOK, dengan jumlah keseluruhan tenaga kerja yang terserap adalah 20.272 HOK.

Pengelolaan Tahura R.Soerjo sebagai kawasan konservasi, sekaligus sebagai sarana rekreasi alam juga perlu dilakukan secara optimal, hal ini ditunjukkan melalui pembangunan dan pengelolaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang. Selama periode 2009-2011 telah dibangun 1 unit pos pantau dan pembangunan ruang ganti dan shelter. Tahun 2010 dilakukan pemeliharaan terhadap Air Terjun

Watu Ondo, Mojokerto. Pembenahan dan pembangunan sarana dan prasarana pada tahun 2011 berupa pembuatan pagar guest house dan perbaikan atap aula. Dengan adanya pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana obyek wisata alam serta pembenahan yang terus menerus terhadap fasilitas yang ada bagi pengunjung obyek wisata alam Tahura R.Soerjo, kunjungan wisatawan semakin meningkat jika dilihat selama tahun 2009-2011. Jumlah Pengunjung yang semakin meningkat telah berhasil memberikan PAD bagi Jawa Timur, dimana pada tahun 2010 PAD melalui retribusi karcis masuk ke Tahura R.Soerjo sebesar Rp. 761.478.750,- meningkat menjadi Rp. 874.435.000,- pada tahun 2011 atau mengalami peningkatan sebesar 14,83%.

**e) Permasalahan dan Upaya Pemecahannya**

**Permasalahan**

- Pada kawasan hutan konservasi terjadinya pencurian kayu meluas pada pencurian hasil hutan bukan kayu diantaranya rebung, bambu, pohon pakis dan humus hutan dengan frekuensi dan volume yang sangat berpengaruh bagi keberlangsungan ekosistem kawasan konservasi
- Terbatasnya petugas ditempat wisata alam yang tidak sebanding dengan lokasi yang dikelola dan meningkatnya jumlah pengunjung sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan pengunjung dan kebersihan lokasi wisata alam.
- Lokasi reboisasi jauh dan sulit dijangkau dan kondisi lapangang/topografi yang terjal
- Sarana dan prasarana pemadam kebakaran hutan sangat terbatas sedangkan lokasi/ kawasan yang terbakar sangat jauh dan sulit dijangkau.
- Masih terbatasnya pemahaman masyarakat sekitar hutan tentang pentingnya pelestarian hutan khususnya kawasan konservasi

- Pelaksanaan penanaman tergantung pada musim penghujan yang jatuh pada triwulan keempat.

**Upaya Pemecahannya:**

- Penanganan pencurian kayu melalui operasi gabungan bersama Polisi dan Kelompok Tani Hutan.
- Menugaskan staf yang berada di kantor UPT maupun seksi KPPKH untuk membantu ditempat wisata alam khususnya pada liburan hari-hari besar.
- Diupayakan kegiatan reboisasi untuk dilaksanakan dengan penaburan benih secara manual pada lokasi-lokasi yang sulit dilakukan dengan penanaman.
- Diusulkan dengan Pemerintah Provinsi sekiranya dapat menjalin kerja sama dengan instansi/ Dinas lain yang memiliki fasilitas untuk pengendalian kebakaran hutan (TNI, BBKSDA, BASARNAS)
- Melaksanakan penyuluhan secara rutin pada masing-masing desa penyangga dan sekolah-sekolah.
- Mengingat pelaksanaan kegiatan penanaman yang tergantung pada musim penghujan, maka proses pengadaan barang disesuaikan dengan musim tanam

#### **4) Program Perencanaan dan pengembangan Hutan**

##### **a) Tujuan**

Mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang sumber daya potensi kekayaan alam hutan, serta lingkungannya secara lengkap yang kemudian menjadi dasar bagi terciptanya suatu neraca sumber daya hutan dalam rangka mendukung suatu perencanaan kehutanan yang transparan, bertanggung jawab, partisipasi, terpadu serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah.

b) **Sasaran**

Mengembangkan Sistem Perencanaan Yang Mantap, Sistem Informasi Yang Akurat, Inventarisasi, Pengolahan Data Dan Litbang Bidang Kehutanan Serta Jaringan Kerjasama Dengan Seluruh Stakeholder Dalam Pembangunan Kehutanan

c) **Pagu dan Realisasi Program:**

Program Perencanaan dan pengembangan Hutan sebesar Rp. 1.495.570.250,00 dengan realisasi Rp. 1.450.693.600,00 (97,00), Secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada LAMPIRAN (matrik 11 kolom)

d) **Hasil Pelaksanaan Pembangunan:**

- Tersedianya data potensi dan informasi pelaksanaan pembangunan kehutanan
- Tersedianya buku statistik
- Buku Monitoring Pembangunan Kehutanan Jawa Timur
- Buletin Kehutanan 4 Edisi
- Pameran Kehutanan

No.	Komponen	2010	2011
1.	Tersedianya data potensi dan informasi pelaksanaan pembangunan kehutanan	100 Buku	100 Buku
	Tersedianya buku statistik	100 Buku	100 Buku
	Buku Monitoring Pembangunan Kehutanan Jawa Timur	30 Buku	30 Buku
	Buletin Kehutanan	4 Edisi (800 ekspl)	4 Edisi (1000 ekspl)
	Pameran	5x Pameran	8x Pameran
2.	a. Buku Akuntabilitas	30 Buku	buku
	b. Buku Tahunan Dinas Kehutanan	30 Buku	buku
	c. Buku LKPJ	30 Buku	buku
	d. Update database kehutanan	-	4 Kali
	Perencanaan pembangunan kehutanan	38 Kab/ Kota	38 Kab/ Kota

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

Pembangunan kehutanan melalui program perencanaan dan pengembangan hutan selama periode 2010-2011 telah berhasil mengembangkan sistem perencanaan yang mantap dengan tersedianya sistem informasi yang akurat berupa data statistik dan potensi pembangunan kehutanan, data strategis kehutanan dan informasi pembangunan kehutanan lainnya melalui bulletin yang rutin diterbitkan tiap 4 edisi dengan jumlah pencetakan yang meningkat dari 800 eksemplar pada tahun 2010 menjadi 1000 eksemplar pada tahun 2011 atau meningkat 25%. Selain itu untuk meningkatkan ekspose dan promosi hasil kegiatan pembangunan kehutanan di Jawa Timur telah dilaksanakan Pameran kehutanan pada tahun 2010 mengalami peningkatan dari 5 kali pameran pada tahun 2010 menjadi 8 kali pameran pada tahun 2011 atau meningkat 60%, hal ini menunjukkan adanya antusias minat masyarakat untuk mengetahui perkembangan yang ada dalam pembangunan kehutanan.

Dalam mendukung sistem perencanaan yang mantap di sektor kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur selama tahun 2010-2011 telah melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi dengan instansi terkait di Kabupaten/Kota, UPT Kementerian Kehutanan, Bappeda Provinsi Jawa Timur secara berkelanjutan.